



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN
DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN KEPALA BSKJI**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Mei 2022
Waktu	:	Pukul 10.30 WIB s.d. 12.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	:	Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	:	1. Rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk pembangunan <i>Industri Integrated Center</i> , 2. Tata kelola UPT BSKJI paska Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN, 3. Lain-lain.
Hadir	:	24 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 5 orang anggota dari 11 anggota:
1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
 2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
 3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
 4. Ribka Tjiptaning ploretariyati
 5. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

- 2 orang anggota dari 7 anggota:
1. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.

2. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. H. Iwan Kurniawan, S.H.
3. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota

1. Ina Elisabeth Kobak
2. Arkanata Akram, S.T.,B.E.(Hons), M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
2. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Zulfikar Hamonangan, S.H.
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Rofik Hananto, S.E.
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Doddy Rahadi)
2. Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Eko S.A. Cahyanto)
3. Direktur Perwilayahan Industri (Adie Rochmanto Pandiangan)
4. Direktur Akses Industri Internasional (Yan Sibarang Tandiele)
5. Direktur Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional (Iken Retnowulan)

6. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (Binoni Tio A. Napitupulu)
7. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (E. Ratna Utarianingrum)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO /F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Selamat pagi.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional serta juga dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera kami sampaikan.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI telah hadir secara *virtual* memang, Pak Bambang Haryadi, Pak Doni Oekon juga Pak Edi Suparno dan Pak Maman Abdurahman.

Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun melalui *virtual*.

Yang kami hormati Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional.

Yang kami hormati Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa bahwa karena atas karunia-Nya hari ini kita semuanya sehat wal'afiat dan syukur *alhamdulillah* Covid-19 terus turun bahkan Presiden telah mengumumkan bahwa kita juga diperkenankan dalam tingkat-tingkat tertentu tidak menggunakan masker, tetapi tetap saja kita harus tetap jaga protokol Kesehatan dengan baik.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai undangan yang telah disampaikan,

berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021/2022 pada hari ini, Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pertahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda sebagai berikut:

1. Rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk pembangunan Industri *Integrated Center*,
2. Tata kelola UPT BSKJI pasca Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional,
3. Lain-lain.

Bapak/Ibu,
Hadirin sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 18 anggota dari 52 anggota, terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota rapat agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah disetujui?

Baiklah.

Dengan persetujuan anggota dan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Dengar Pendapat Komisi DPR RI VII dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum kita mulai lebih lanjut rapat, sebelumnya kami ingin memperkenalkan Anggota Komisi VII DPR RI yang baru, yakni yang terhormat Bapak Muhammad Fauzi, S.E. Nomor Anggota A-344 Fraksi Partai Golkar, dimana sebelumnya Beliau duduk di Komisi V dan di Komisi VII menggantikan H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B yang pindah ke Komisi II.

Selamat datang yang terhormat Bapak H. Muhammad Fauzi, inilah Komisi VII dan *Insha* Allah kita secara bersama-sama bagaimana membangun DPR, membangun bangsa ini melalui DPR ini untuk yang lebih baik.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini DPR RI, mohon maaf sudah saya kemukakan tadi. Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul kurang lebih pukul 12 lewat 30 ya, maaf 2 jam sejak dimulai rapat ini berarti pukul 12.40 WIB WIB, sepakat Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sebelum memasuki agenda rapat hari ini, mengingat saat ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, maka kami mengucapkan *minal aidin wal faizin* mohon maaf lahir dan batin, semoga segala kesalahan dan kesilapan kami dapat kita saling maaf-memaafkan dan kita atas ridho dan hidayah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kita ke depan akan jauh lebih baik. Amin-Aamin *ya robbal alamin*.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian tanggal 25 Agustus yang lalu, Komisi VII DPR RI telah mendalami arah pembangunan industri oleh pemerintah, yakni industri yang mandiri dan berdaulat, industri maju dan berdaya saing, dan industri yang berkeadilan dan inklusif. Penekanan-penekanan semacam ini menjadi penting sehingga bisa menjadi standar-standar kuantitatif akhirnya nanti dalam kita mengevaluasi.

Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan, dalam hal ini ingin mendapatkan penjelasan yang rinci tentang pengejawantahan industri yang inklusif. Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangkalan pada tanggal 16 November yang lalu, telah disampaikan strategi kawasan peruntukan industri. Salah satu program yang disebut super prioritas karena bertujuan di antaranya adalah untuk menumbuhkan industri kecil modern dan mengembangkan substitusi impor. Maka Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan tingkat realisasi program yang disebut sebagai program pembangunan *industrial integrated center*.

Komisi VII DPR RI selalu menyambut baik kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, sertifikasi industri hijau maupun sosialisasi *green economy*. Namun demikian, Komisi VII DPR RI merekam juga bahwa aspirasi masyarakat yang mempertanyakan keberlangsungan pelayanan yang mereka butuhkan dari unit pelaksana teknis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau dengan kata lain tata kelolanya paska Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Ini sekali lagi banyak mendapatkan pertanyaan untuk aspirasi dari masyarakat.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat, kami persilakan Saudara Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan juga nanti Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan pemaparannya.

Dipersilakan, Pak Dirjen.

DIRJEN KPAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Komisi VII yang terhormat, Bapak Sugeng Suparwoto beserta Pimpinan Komisi VII Pak Doni Oekon, Pak Maman, Pak Bambang Haryadi, Pak Eddy Soeparno yang hadir secara *virtual*, Yang kami hormati para Anggota Komisi VII yang terhormat, baik yang hadir secara fisik di dalam ruang rapat Komisi VII maupun yang hadir secara *virtual*.

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah dan masih dalam suasana hari raya dan kami juga mohon maaf lahir dan batin.

Mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, berkaitan dengan agenda rapat hari ini untuk pemaparan rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, khususnya dalam program pembangunan kawasan industri. Dapat kami sampaikan mengenai kebijakan umum perwilayahan industri dahulu. Sesuai dengan sasaran pengembangan perwilayahan industri yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional, sasaran pengembangan industri sampai tahun 2035, yang pertama adalah peningkatan peran wilayah luar Jawa dalam penciptaan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas menjadi kira-kira 40% dari total nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas nasional.

Kemudian kami menargetkan pembangunan 36 kawasan industri dengan prioritas pengembangan di luar pulau Jawa, yang didukung dengan penyediaan lahan sekitar 50 ribu hektar dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah baru sehingga terdapat minimal satu sentra IKM di setiap kabupaten kota. Hal ini berkaitan dengan kebijakan inklusivitas dari industri yang harus juga menjangkau industri kecil dan menengah karena mereka penting sekali dalam rangka mendukung rantai *supply* di sektor industri.

Dari kebijakan tersebut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, untuk wilayah pusat pertumbuhan industri adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan industri yang strategis, kompetitif dan berkelanjutan. Kemudian penataannya melalui tata ruangnya di kawasan peruntukan industri untuk menciptakan keharmonisan dan saling mendukung antar fungsi ruang industri terhadap fungsi ruang lainnya, sehingga daya dukung lingkungan dapat juga menjadikan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang ada di dalamnya lebih *sustain* dan berkelanjutan.

Kemudian untuk kawasan industrinya sendiri, kami menargetkan agar kita bisa meng-*upgrade* kawasan-kawasan industri yang ada, termasuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri yang baru sehingga bisa

mendukung konsep *eco smart industry park* yang menjadi bagian dari rantai pasok global, di mana secara internasional saat ini standar-standar semakin banyak diterapkan.

Kemudian kami juga perlu mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan kawasan industri tematik di Indonesia yang saat ini kami kenal, kami sebut sebagai kawasan-kawasan tertentu. Kemudian kami juga melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mengendalikan fungsi ruang untuk industri terhadap daya tampung dan daya dukung sosial dan lingkungannya.

Selanjutnya perlu kami sampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, mengenai persebaran kawasan industri di Indonesia. Saat ini sudah terdapat 138 kawasan industri, yang artinya kawasan ini sudah memiliki izin usaha kawasan industri. Masih ada beberapa kawasan calon kawasan industri yang masih dalam pengembangan dan masih dalam proses, sehingga nanti mereka baru bisa mendapatkan izin usaha kawasan industri setelah memenuhi ketentuan dari pedoman pembangunan kawasan industri tersebut. Saat ini kami mendorong lebih banyak kawasan industri dibangun di luar pulau Jawa, fasilitas yang kami lakukan demikian karena sampai dengan saat ini sebagian besar kawasan industri masih berada di Pulau Jawa, meskipun luasannya untuk di kawasan di Pulau Jawa tidak terlalu besar namun jumlahnya sangat luas. Oleh karena itu, saat ini kami juga mendorong pengembangan kebijakan untuk penataan ruang, terutama kalau di pulau Jawa, penataan koridor utara Pulau Jawa, di mana kawasan-kawasan industri itu sekarang lebih banyak berada, mulai dari Cilegon, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur.

Mengenai tingkat okupansi kawasan industri di Indonesia saat ini kalau kita lihat dari luasan dan jumlahnya, memang tidak berkembang yang di pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Namun saat ini untuk kawasan industri di Pulau Jawa sendiri sebenarnya cukup tersedia, masih cukup tersedia *space* untuk menjadi tempat lokasi investasi industri. Namun, perlu juga ada upaya untuk pengembangan di luar pusat kawasan industri yang saat ini lebih banyak berada di Kawasan Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Oleh karena itu, di Kawasan Rebana yang baru di bagian utara dan timur Jawa Barat, kami dorong bisa lebih cepat dikembangkan sehingga bisa mengakomodasi pengembangan-pengembangan dan perluasan industri yang sekarang berada di Kawasan Bekapur.

Untuk itu, kami juga terus bekerjasama mendorong bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, terutama mengenai kebutuhan dari infrastruktur pendukung sehingga konektivitas antara infrastruktur jalan saat ini yang ada bisa tersambung dan lebih mudah masuk ke dalam kawasan-kawasan industri yang sedang dibangun tersebut.

Kemudian Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, berkaitan dengan persebaran kawasan industri yang menjadi prioritas pemerintah, baik yang ditetapkan dalam RPJMN maupun ditetapkan dalam bentuk PSN saat ini ada 18 kawasan industri yang berada dalam skema RPJMN, kemudian ada 7

kawasan yang masuk dalam skema PSN, sedangkan ada 9 kawasan industri yang ada di keduanya. Nah, ini yang kami dorong kawasan-kawasan industri ini berkaitan dengan potensi wilayah yang memang cukup besar dan pengembangan ini seperti kami sampaikan tadi ini sudah diatur di dalam rencana induk pembangunan industri nasional.

Berikutnya ini penting kami sampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, bahwa kami mendorong kawasan-kawasan industri ini bertransformasi menjadi kawasan industri generasi keempat. Jadi Kawasan industri yang ada sekarang sebagian besar masih berada di generasi kedua dan sebagian generasi ketiga. Namun, untuk mendukung *sustainability* dari industri dengan penerapan standar-standar keberlanjutan berkaitan dengan nanti Tusi dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, kami mendorong kawasan-kawasan industri ini masuk menjadi kawasan industri generasi keempat, dimana bisa mereka menyiapkan *smart infrastructure*, kemudian *human capital infrastructure*, mereka bisa mendukung *circular economy* di sana, kemudian baik dari logistik maupun *digital hub*-nya bisa tersedia dengan baik. Saat ini, beberapa kawasan industri sudah menerapkan hal tersebut dan nanti, kami juga membuat beberapa project yang bekerjasama dengan Unido dan Swiss untuk juga bisa memanfaatkan energi baru dan terbarukan, sehingga industri sebagai salah satu sektor yang menyerap energi cukup besar bisa mempercepat transisi energinya.

Selanjutnya Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, terkait dengan kesiapan dari kawasan industri untuk menerima investasi dan menjadi lokasi investasi yang ada kami terus mendorong pengembangan kawasan industri terutama di luar Pulau Jawa. Jadi terkait dengan prioritas-prioritas yang kami tetapkan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah, kami dorong untuk lebih ke arah luar Pulau Jawa.

Selanjutnya mohon izin sedikit kami tambahkan Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat. Terkait dengan kawasan tertentu, seperti misalnya kawasan industri halal sudah pernah dikunjungi juga oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII di modern Cikande, masih ada 2 lagi yang ada di Sidoarjo dan di Bintan ini terus kami dorong juga. Saat ini memang banyak sekali keinginan dari industri, terutama industri kecil dan menengah untuk mereka bisa masuk dalam kawasan industri halal tersebut. Nah, ini yang kami masih terus mendorong adanya insentif-insentif baru, sehingga bisa membedakan antara kawasan industri yang biasa dengan kawasan industri halal sehingga bisa mendorong lebih cepat terciptanya ekosistem halal dalam kawasan industri halal tersebut.

Kemudian dengan tren dari digitalisasi yang ada, saat ini kawasan industri tertentu seperti kawasan industri digital sebagai tempat dari data center, seperti yang sekarang sedang dan sudah dibangun, baik di Batam, di Jawa Barat di sekitar Jatiluhur ini juga saat ini cukup banyak mendapat permintaan, terutama di sekitar wilayah Kepulauan Riau, di mana bisa mendukung infrastruktur digital yang berdekatan dengan hub di Singapura. Selain itu, kawasan industri tertentu yang lain seperti misalnya hortikultura dan tembakau, ini juga banyak kami mendapat pertanyaan dan keinginan dari

berapa industri untuk mereka bisa memanfaatkan konsep kawasan tertentu ini sebagai lokasi integrasi dari pelaksanaan alokasi industrinya.

Kemudian pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, berkaitan dengan pengembangan kawasan industri ini, ada beberapa tantangan yang saat ini memang masih perlu kita cermati dan masih terus perlu kita selesaikan. Yang pertama, berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini penting sekali karena beban untuk pembangunan, pengembangan dan pembangunan kawasannya ini untuk kawasan-kawasan industri yang lebih banyak dibangun oleh swasta ini cukup besar. Oleh karena itu, di beberapa kawasan tertentu di mana kawasan tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan, kami bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait agar ada fasilitasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang yang bisa berkoneksi dengan kawasan-kawasan industri tersebut.

Kemudian berkaitan dengan pengelolaan dan *tenant* ya, ini kami terus mendorong penerapan dari *estate regulation* di dalam kawasan-kawasan industri tersebut sehingga bisa lebih tertata dengan baik.

Iklim usaha industri sekarang sudah baik sekali Pak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, terutama sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri. Namun, masih ada beberapa tantangan, di mana beberapa daerah belum memiliki kawasan industri dan ada industri yang ingin berinvestasi di sana dengan memanfaatkan potensi wilayahnya, ini belum bisa tertampung di kawasan industri. Sementara untuk membangun kawasan industri itu juga memang memerlukan satu *effort* yang cukup tinggi.

Selain itu berkaitan dengan tata ruang dan lahannya, dengan semakin terbatasnya ruang yang tersedia dan semakin tingginya harga lahan yang tersedia ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kawasan industri tersebut. Ini yang perlu kira-kira penting kami sampaikan pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, kami mohon arahan Pimpinan dan Anggota Komisi VII berkaitan dengan rencana strategis program prioritas kami di tahun 2022.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Demikian tadi Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Aset Industri Internasional dan selanjutnya dipersilakan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.

Dipersilakan Pak.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Ketua Komisi VII DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto dan unsur Pimpinan Komisi VII DPR RI, Pak Dony M. Oekon, Pak Maman Abdurahman, Pak Bambang Haryadi dan Pak Edi Suparno, serta Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir fisik dan *online* disini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Pada kesempatan ini, tentunya kami juga ingin menyampaikan permohonan *minal aidin wal faidzin*, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII.

Pada kesempatan ini juga, kami ingin memberikan apresiasi kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk menyampaikan penjelasan kepada rapat pagi ini terkait 2 agenda, yaitu rencana pembangunan *industrial integrated center* dan kedua tata kelola UPT BSKJI paska Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Kami akan langsung membahas pada agenda pertama yaitu rencana pembangunan *industrial integrated center*. Perlu Bapak/Ibu ketahui sebelumnya bahwa rencana pembangunan *industrial integrated center* ini bukan merupakan program prioritas BSKJI pada tahun 2022 dan ini menyebabkan penganggaran untuk pembangunan *industrial integrated center* tidak ada dalam DIPA BSKJI tahun anggaran 2022.

Pada tahun 2021 yang lalu, kegiatan pembangunan IIC ini program ini memang diusulkan kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Perindustrian Nomor B/30/M-IND/KU/62021 tanggal 7 Juni 2021 perihal permohonan penambahan alokasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2022. Namun, sepertinya kegiatan pembangunan IIC ini tidak disetujui anggarannya.

Adapun, untuk tahun 2022 kegiatan yang sedang berjalan adalah pendirian *Indonesia Manufacturing Center* atau IMC yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal ILMATE. Oleh karena itu, izinkan kami untuk lebih banyak menyampaikan agenda yang kedua, terkait tata kelola UPT BSKJI/Badan

Standardisasi dan Kebijakan Industri paska Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. *Next slide.*

BPPI (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri) yang merupakan salah satu unit Eselon 1 di Kementerian Perindustrian telah bertransformasi menjadi BSKJI (Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri). Perubahan nomenklatur dan Tusi tersebut selanjutnya diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pada bulan November 2020 dan Permenperin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja atau Ortaker Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan pada bulan Februari 2021. Tugas dan fungsi BSKJI menurut Perpres Nomor 107 Tahun 2020 adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

BPPI mempunyai lingkup tugas dalam hal, standarisasi bidang industri, penerapan industri hijau dan penelitian, pengkajian dan pengembangan. Dengan transformasi menjadi BSKJI lingkup tugas unit kerja lebih fokus pada perumusan, penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri, pengawasan dan pengendalian standarisasi industri, penguatan kebijakan industri hijau, pemberian rekomendasi jasa industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Dalam hal ini, BSKJI sudah tidak menangani Tusi Litbang-nya seperti terdahulu.

Kami sampaikan struktur organisasi BSKJI saat ini, unit kerja kami terdiri dari sekretaris badan dan 4 kepala pusat, yaitu Pusat Perumusan Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Pusat Pengamatan Standardisasi Industri, Pusat Industri Hijau dan Pusat Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri. Selain itu BSKJI juga diperkuat dengan unit pelayanan teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Ambon. Terdiri dari 11 balai besar standarisasi dan pelayanan jasa industri, ini unit Eselon 2, Pak. Kemudian 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dulu dikenal Baristan, ini dikepalai oleh Eselon 3.

Pusat Perumusan dan Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai lingkup Tusi, perumusan standarisasi industri, pengembangan standarisasi industri, termasuk juga melakukan kajian dan peninjauan terhadap standar yang akan atau telah diterbitkan, kemudian penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri dan penetapan lembaga penilai kesesuaian, juga penguatan standarisasi industri melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan LPK atau Lembaga Penilai Kesesuaian.

Kemudian, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai lingkup Tusi, pencegahan dan penegakan hukum standarisasi industri, yang diantaranya melakukan pengendalian dan penegakan hukum melalui kegiatan pengamatan dan penelitian atas dugaan pelanggaran dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Kemudian, pengawasan standarisasi industri, pengawasan lembaga penilaian kesesuaian dan pengembangan infrastruktur

pengawasan standarisasi industri, termasuk di antaranya memberikan pembinaan terhadap petugas pengambil sampel industri dan PPNS.

Kemudian, Pusat Industri Hijau mempunyai lingkup Tusi, perumusan kebijakan dan standarisasi industri hijau, penguatan kapasitas kelembagaan sertifikasi industri hijau, pengawasan dan pengendalian industri hijau dan kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Ini yang terus di, saat ini mengenai industri hijau ini dan digitalisasi tentu ada di tempat kami. Untuk ke depannya untuk pembahasan *carbon trade*, *carbontex* dan lain-lain ada disini berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait.

Kemudian Pusat Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai lingkup tugas dan fungsi, rekomendasi kebijakan jasa industri, yang meliputi kajian, perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Tentu ini juga terkait ke depan tidak hanya barang produk manufaktur tapi jasanya yang harus bisa kita lakukan di dalam negeri, yang selama ini kita fokus pada manufaktur jasanya yang tentu berkembang lebih cepat, nah kita juga ingin itu ada di dalam negeri. Kemudian, pemantauan pelaksanaan kebijakan jasa industri, optimalisasi, pemanfaatan teknologi industri yang diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan dana alokasi pemanfaatan teknologi industri, kemudian pembuatan industri 4.0 ini yang terkait digitalisasi, terkait transformasi digital itu Pak, ini juga dilaksanakan di sini.

Lalu dari sisi postur anggaran periode 2018 hingga 2020 bisa dilihat pada diagram, bahwa alokasi terbesar anggaran BSKJI setiap tahunnya didominasi untuk keperluan gaji, operasional dan non-operasional dan setelahnya untuk alokasi sarana dan prasarana jasa industri, tentunya ini untuk yang lain-lainnya hanya kecil sekali nilainya. Kemudian mulai dari tahun 2021 BSKJI sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Litbang dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

UPT di lingkungan BSKJI tersebar, tadi saya sudah sampaikan di seluruh Indonesia dari Banda Aceh hingga Ambon, ada 24 Satker tadi dengan dukungan dari 11 balai besar yang berubah nomenklturnya menjadi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri dan 13 balai yang nomenklturnya menjadi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Diharapkan, kami melalui UPT ini dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan juga mendorong perkembangan industri di daerah dan nasional pada umumnya untuk mendukung industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif.

Ada beberapa kegiatan yang pernah diikuti apa namanya, bimbingan teknis yang pernah Bapak Pimpinan, ada hadir juga membuka pada waktu, beberapa itu Pak kegiatan-kegiatan kami terkait bimbingan teknis ke dunia industri dan masyarakat di daerah. UPT kami memiliki Tusi utama yang merupakan turunan langsung dari Tusi BSKJI, yaitu optimalisasi pemanfaatan

teknologi, penguatan industri 4.0, rekomendasi kebijakan jasa industri dan pemantauan pelaksanaan kebijakan jasa industri.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian pada tanggal 10 November 2020, nomenklatur BPPI berubah menjadi BSKJI dan turut menghilangkan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka BSKJI di awal tahun 2021 melakukan pemetaan terhadap SDM untuk mengakomodir tugas dan fungsi baru, khususnya Jabatan Fungsional Peneliti dikarenakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, kedudukan peneliti berada pada organisasi penelitian, pengembangan dan atau pengkajian instansi pemerintah. Lalu setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN pada tanggal 18 April 2021, Menteri PAN RB mengeluarkan surat edaran pada tanggal 22 Juli 2021 tentang Pengalihan Peneliti pada Lembaga Litbang Kementerian atau Lembaga ke BRIN.

Oleh karena itu, BSKJI kembali melakukan pemetaan Jabatan Fungsional Peneliti dengan memperhatikan opsi untuk perpindahan ke BRIN. Dari hasil pemetaan tersebut terdapat 22 orang fungsional peneliti yang telah diusulkan untuk dialihkan ke BRIN melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, yang telah dilakukan verifikasi dokumen pada bulan November 2021. Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2021 kembali keluar Surat Edaran Menteri PAN RB tentang Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi Litbangjirap jabatan peneliti, perekayasa dan teknisi Litkayasa pada kementerian atau lembaga ke BRIN. BSKJI kembali menindaklanjuti edaran tersebut dengan melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional perekayasa dan teknisi Litkayasa.

Dari hasil pemetaan tersebut terdapat 21 orang fungsional perekayasa yang telah diusulkan untuk dialihkan ke BRIN melalui Surat Menteri Perindustrian pada bulan Januari 2022. Dalam melakukan pemetaan terhadap Jabatan Fungsional Litbangyasa, BSKJI juga memperhatikan batas usia pindah jabatan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pensiun dan jabatan fungsional, khususnya fungsional peneliti dan perekayasa yang berbeda dengan jabatan fungsional lainnya. Dengan memetakan usia sebagaimana tersebut, bisa dipetakan juga pejabat fungsional peneliti yang memiliki usia kritis sehingga harus diproses sesegera mungkin.

Setelah diundangkannya Peraturan Presiden tentang BRIN di bulan Juli 2021, Menteri PAN RB mengeluarkan edaran kepada lembaga atau kementerian untuk melakukan pemetaan jabatan fungsional peneliti dan pengalihannya ke BRIN dengan batas waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Pada bulan Desember 2021 Menteri PAN RB kembali mengeluarkan edaran, kali ini terkait pengalihan PNS yang melakukan fungsi Litbangjirap dalam jabatan peneliti, perekayasa dan teknisi perekayasa. Dengan adanya edaran ini berarti seluruh jabatan fungsional peneliti, perekayasa dan teknisi

rekayasa tidak bisa berkedudukan di kementerian atau lembaga selain BRIN. Berdasarkan hasil pemetaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Perekayasa di lingkungan BSKJI terdapat 292 orang fungsional peneliti dan 105 orang fungsional perekayasa dan tersebar pada setiap jenjang keahlian.

Perkembangan terakhir dari proses pengalihan fungsional Litbangjirap yaitu adanya Surat Kepala BRIN pada bulan Maret 2022 yang mengembalikan usulan pengalihan 21 orang perekayasa Kementerian Perindustrian dengan alasan bahwa Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa yang melaksanakan tugas di luar Litbang tetap dapat menduduki jabatan tersebut. Saat ini dari total 2.089 pegawai di lingkungan BSKJI terdapat 1211 orang yang menjabat sebagai fungsional tertentu dengan persentase peneliti sebesar 21,5%. Akhirnya sebagai penutup, berikut ini dapat dilihat rincian sebaran jabatan fungsional tertentu di lingkungan BSKJI yang terdiri dari 23 jenis jabatan fungsional tertentu.

Selanjutnya, kami mohon arahan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI untuk arahan selanjutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian tadi telah disampaikan hal-hal yang sebagaimana diagendakan dalam rapat kali ini. Sebelum saya persilahkan anggota yang terhormat untuk mendalami, untuk mempertanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan ada catatan-catatan sedikit dari saya, bahwa kita bersyukur cadangan devisa dalam 6 bulan terakhir naik lumayan pesat. Tapi di balik itu justru menjadi keprihatinan kenapa? Ternyata cadangan devisa itu adalah sebagian besar dikarenakan komoditas. Justru kalau kita lihat secara proporsional naiknya komoditas itu sentuhan industrinya kurang begitu massif, kenapa? Terlebih kalau misalnya dibandingkan dengan industri manufaktur. Manufaktur bahkan dalam catatan-catatan disampaikan beberapa analisis, bahkan terjadi terus-menerus penurunan yang menjadi di dalam komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur terus mengalami juga setidaknya juga beranjak secara proporsional. Bahkan disinyalir justru terjadi deindustrialisasi di bidang manufaktur. Betapa rentanya kita ekspor komoditas itu, terbukti cadangan devisa yang sempat menyentuh USD 141 miliar dalam 2 minggu anjlok sekitar 3 miliar dolar gara-gara pemerintah melarang ekspor CPO. Inikan juga menjadi bagaimana secara proporsional saja bahwa komoditas mendominasi, itu juga ada titik rawannya.

Maka dari itu, kalau kita lihat dari sisi persebarannya, betul bahwa komoditas memang sebagian besar adalah di luar Jawa sehingga terjadi ada semacam persebaran indeks gini ratio menurun, artinya bagus persebaran sentra-sentra ekonomi. Hanya saja, Pulau Jawa yang di mana di situ adalah mayoritas adalah manufaktur dalam perkembangannya kemudian tidak tumbuh secara sebagaimana diharapkan. Meskipun betul ini masih pasca Covid.

Untuk itu, saya mencatat bagaimana Perindustrian terus meningkatkan komitmennya membangun industri-industri manufaktur secara lebih baik, lebih meningkat karena memang justru manufakturlah yang disamping menyerap tenaga kerja, disamping disitu juga ada modal kapital, ada teknologi dan seterusnya-seterusnya. ini catatan bagaimana perluasan kawasan industri harus juga memperhatikan bagaimana industri-industri manufaktur ah yang didorong habis-habisan agar perkembangannya menjadi jauh lebih baik dari komposisi produk domestik bruto kita.

Kedua, dari UPT pelayanan standardisasi tadi, bagus sekali persebarannya sudah sedemikian rupa. Kalau kita lihat ada semacam dari Eselon 2 dan Eselon 3 penanggung jawab-penanggung jawab tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya diharapkan layanan-layanan menyangkut tentang kualitas, kawasan industri dan sebagainya-sebagainya tidak lagi menjadi persoalan. Ingat, industri atau perindustrian kementerian tidak atau ada layanan, unit pelayanan teknis harus tidak menjadi birokrasi justru harus pro aktif melayani, tapi sekali lagi sebagaimana tadi juga dihantar di depan, keluhan-keluhan masyarakat masih sangat tinggi bagaimana pelayanan-pelayanan dari, unit pelayanan dari teknis ini untuk bisa melayani secara baik sebagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam hal layanan keindustrian.

Sudah barang tentu juga harus diperhatikan bahwa kita telah menandatangani *Paris Agreement*, dimana dalam konteks *sustainability*. Jadi unit pelayanan teknis juga harus mengontrol sedemikian rupa karena kita tahu, sama-sama tahu *climate change* telah masuk betul di kita yakni terdiri karena disebabkan oleh kehutanan *land use* adalah pertanian dan perindustrian dan juga energi. Secara khusus Komisi VII, energi sangat terus memperhatikan bagaimana *clean and renewable energy* yang kita dorong. Jadi ini Kepala BSKJI ini juga memperhatikan aspek-aspek dalam dimensi yang lebih hilistik seperti tadi.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian.

Sekedar pengantar dari saya, kita persilakan untuk yang terhormat Anggota Komisi VII mendalami beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Kepala BSKJI tadi. Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, lewat dulu jadi kalau Pak Andi Fitri atau Pak Iwan Dasi masih merapikan dasinya, Bu Ning? Lewat juga. Dari Fraksi Partai Golkar Pak Gandung Pardiman yang terhormat, ini beliau adalah *ngarso luar*, ada *ngarso dalem*, ini beliau *ngarso luar*.

Dipersilakan yang terhormat.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang kami tanyakan, pertama masalah halaman 5 Pak. Halaman 5 ini tentang okupansi kawasan industri di Indonesia ini Maluku dan Papua itu masih rendah sekali Pak, Maluku dan Papua. Kalau terobosan apa agar supaya tidak terlalu *jomplang*, ini *jomplang* sekali Pak. Kalau *jomplangnya* seperti ini maka tuntutan kemerdekaan Papua itu akan semakin deras ini, saya minta ini untuk ada terobosan untuk bisa percepatan dalam rangka ...(*suara tidak jelas*)... ini.

Halaman 10 Pak, ini tantangan, kami belum lihat bagaimana menjawab tantangan ini, Pak. Apakah hanya dengan membuat DID *masterplan*, kemudian membuat pedoman pengembangan kawasan industri bisa menjawab tantangan ini, ini belum dijelaskan. Tantangan sudah dirumuskan tapi belum dirumuskan bagaimana cara mengatasi tantangan itu. Ini mohon dijelaskan Pak, termasuk masalah perizinan, mengatasi masalah perizinan ini bagaimana.

Kemudian, daya saing ASN. Di sini daya saing kita relatif masih rendah, ini juga tantangan di Ditjen Bapak ini dalam pertahanan dan kewilayahan ini juga mempunyai andil dalam rangka meningkatkan daya saing. Program-program yang rencana ini matriksnya sudah ada, dibuat atau belum Pak. Matriks program ada monev, ada penyusunan NSPK, ini belum ada matriks, baru secara tujuan internasional umum belum bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana untuk strategi pelaksanaan perencanaan dari program Bapak itu terlihat. Saya minta ini nanti di ...(*suara tidak jelas*)... lagi Pak. Jadi ini masih umum, masih kita belum bisa memberikan suatu penilaian secara mendasar dan pokok-pokok, ini baru pokok-pokok.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, yang terhormat Bapak Gundung Pardiman dari Fraksi Partai Golkar.

Masih Pak Fauzi dari Fraksi Partai Golkar, ya dilanjutkan Fraksi Gerindra mungkin yang ada di *virtual*. Kalau belum ada dipersilakan yang terhormat dari Fraksi Partai Nasdem ada yang terhormat Pak Arkanata, ada Pak Rico Sia.

Silakan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama-tama, saya juga mengucapkan *minal aidin wal faidzin* mohon maaf lahir bathin untuk semua rekan-rekan, baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*, juga dari Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Transformasi BPPI menjadi BSKJI.

Sama seperti yang disampaikan oleh rekan saya dari Golkar tadi terkait dengan Papua Barat, saya dapilnya Papua Barat. Di situ ada, langsung saja ini, di situ ada wilayah Papua Barat ini yang rencananya terkait dengan Undang-Undang Otsus Nomor 2 itu akan dibagi menjadi Papua Barat Daya, itu nanti ada 2, ada bagian Papua Baratnya yaitu Manokwari dan sekitarnya, juga ada Sorong Raya ya, Sorong dan sekitarnya.

Nah, ke dua ini sudah ada infrastruktur yang cukup memadai hanya saja yang tadi baru ditunjuk adalah di wilayah Bintuni. Wilayah Bintuni itu mungkin terkait pabrik kimia tadi, selanjutnya tapi di ibukota provinsi yang tentunya adalah Manokwari juga memiliki tempat di mana bisa menjadi pusat sentral daripada industri dari wilayah-wilayah sekitarnya. Demikian juga dengan Sorong, oleh karenanya, mohon menjadi perhatian bagi rekan-rekan agar bisa memasukkan ini menjadi wilayah perindustrian tentunya di kemudian hari.

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin itu saja.

KETUA RAPAT:

Iya, menyangkut tentang kawasan industri di Papua Barat ya. Betul Kawasan Bintuni dan juga Papua Barat sebetulnya ada industri migas yang besar yakni Tangguh Train-1, Train-2, Train-3 sekarang yang sedang proses saya kira itu dan direncanakan ada perluasan Pupuk Kaltim akan membangun kawasan industri juga di Bintuni. Hanya saja memang terjadi perdebatan tentang lokasinya, memang lebih pada menitikkan pada titik turunan dari migas, khususnya gas karena memang kawasan Papua Barat kaya sekali gas.

Ya, terima kasih dari yang terhormat anggota dari Nasdem.

Selanjutnya dilanjutkan dari Fraksi Pak Hendrik Demokrat. Dipersilakan Pak Hendrik.

F-PD (Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII, dan Yang kami hormati Pak Dirjen dan Pak Kepala BSKJI.

Pendalaman saya pertama ke Pak Dirjen, Pak Dirjen saya Hendrik Sitompul dari Dapil Sumut 1 Pak, Medan, Deli Serdang, Sergei Tebing. Saya ada membaca paparan Bapak di sini, untuk Kawasan industri yang ada di Sumatera Utara ada 3 ini Pak, mohon penjelasan di mana lokasi tersebut.

Berikutnya, saya mohon penjelasan juga, ketika izin usaha kawasan industri muncul, apa peran dari kedirjenan ini dalam pengelolaan kawasan itu Pak, sampai sejauhmana ketika itu Bapak sudah keluaran izinnya, karena seingat saya di Medan itu ada Kawasan Industri Medan dan yang mengelola itu BUMN, nah yang 2 (dua) lain saya nggak tahu. Ini bagaimana kolaborasi antara Pak Dirjen dengan BUMN ataupun pihak swasta mungkin ada mengelola kawasan industri ini, dan itu penting bagi kami karena pertama saya lihat di kawasan industri Medan, Pak. Itu saya lihat penataannya saya kira harus ditinjau ulang, khususnya terkait dengan keluar masuknya truk di Kawasan Industri Medan itu, dan kelihatannya harus ditata ulang, bagaimana agar jalur logistik yang ada di kawasan industri itu yang saya tahu, 2 (dua) lagi saya tidak tahu, Pak.

Berikutnya, saya ingin tahu apa program dari Pak Dirjen untuk bagaimana industri-industri sekitarnya masuk di kawasan industri tersebut Pak, karena kalau lihat Medan itu apa namanya, industri-industrinya menyebar Pak, dan kadang-kadang akhirnya masyarakat pun terganggu terkait dengan limbah-limbah dari industri ini. Nah, alangkah baiknya semua industri di sekitar itu bisa didorong masuk ke dalam kawasan industri. Nah, saya Mohon penjelasan apakah ada program-program dari Pak Dirjen untuk mendorong industri-industri masuk di kawasan agar apa? Agar nanti terkait dengan lingkungan, Amdal dan segala macamnya bisa tertata baik apalagi Bapak katakan tadi untuk terkait hijau Pak ya, industri hijau.

Ini yang penting mohon penjelasannya dan saya juga mohon penjelasan di Sumut itu kawasan ekonomi khusus, Pak. Apakah ada kaitannya dengan kawasan industri ini, dimana mungkin karena kan industri juga, ya apa hubungannya, apakah karena ada industrinya baru itu terkait dengan Bapak, tapi kalau tidak ada kata industri judulnya itu tidak dikaitkan dengan Bapak gitu, itu Pak Dirjen.

Nah, itu yang penting, saya kira yang pointer itu bagaimana industri-industri di sekitarnya itu Pak bisa masuk ke kawasan itu Pak. Itu yang penting bagi kita karena supaya penataan tata ruang di daerah itu, bisa hijau karena setahu saya kembali lagi Medan itu sangat sedikit penataannya kurang baik karena industri-industri menyebar. Dan saya lihat memang KIM itu memang sudah melakukan pengembangan-pengembangan ya, tapi saya tidak tahu di sini peran dari Pak Dirjen apa di sini, apakah memang seutuhnya semua pengelolaan operasional kawasan industri itu diserahkan kepada perusahaan yang pada saat yang mengelola sekarang, itu yang berikutnya.

Nah, untuk Pak Kepala BSKJI. Jujur Pak, saya membaca paparan Bapak ini kurang puas, Pak karena apa? Saya belum melihat di sini apa yang sudah Bapak lakukan dan akan Bapak lakukan, ini yang saya lihat belum seperti Rekan tadi dari Golkar katakana ini masih normatif. Saya masih belum melihat di sini, dan saya ingin tahu juga apa kolaborasi antara BSKJI dengan Pak Dirjen ini Pak, bagaimana saya belum melihat di sini, paparan ini saya belum melihatnya. Padahal kan sama-sama pelayanan industri, saya belum melihat ini ada kolaborasi 2 (dua) ini antara Pak Dirjen dan Kepala BSKJI, apa yang sudah dilakukan, kita mau tahu wujudnya, tidak hanya laporan-laporan,

apa yang sudah diwujudkan gitu, misalnya kawasan industri ini. Kawasan industri Medan sudah dilakukan ini, ini, ini terkait dengan BSKJI ada di sana kira-kira gitu, apa yang sudah dilakukan di sana. Dan juga mungkin kami bisa ingin tahu kira-kira dalam pengawasan terhadap kawasan ini perlu kami jelaskan juga agar apa, agar nanti dalam kunjungan kami di dapil kami bisa terlihat wah kawasan ini harusnya tertata demikian. Boleh juga di informasikan ke kita agar program Bapak juga bisa tersempurnakan gitu.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, yang terhormat Pak Hendrik Sitompul, sambil makan nggak apa-apa karena saya tiba-tiba tadi lupa sarapan.

Beberapa hal telah digarisbawahi, kok tiba-tiba agak tegang ya kurang rileks nggak kayak biasanya gitu, lapar, betul sekali, betul Pak Gandung ya kok agak.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Bisa tambah, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Dipersilakan.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak BSKJI, narasi ini hanya narasi formal dalam rangka perubahan peran saja tapi apa yang akan dilakukan oleh badan ini untuk tahun 2000, ini belum, sama sekali belum ada Pak, coba dari halaman 1 ke halaman itu hanya informasi-informasi normatif saja. Jadi, Badan Standardisasi ini sangat berperan dalam menentukan arah industri Pak, misalnya tadi Litbang banyak ditarik ke BRIN. Lalu Langkah apa yang Bapak lakukan dalam rangka memberdayakan ini, jangan seperti gamang ini, ini Bapak kelihatan gamang, betul gamang Pak.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN (DODDY RAHADI):

Nggak, Pak.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tapi penyampaian seperti gamang hanya narasi-narasi normatif saja, tidak ada narasi yang mampu mempunyai nilai tambah dalam mewujudkan program Bapak, jangan sampai nanti 2022 ini hanya menghabiskan anggaran saja, tidak program berorientasi tujuan. Jadi ini saya belum bisa menukik Pak, ini hanya penyebaran pejabat fungsional, ini sebenarnya saya tidak perlu tahu ini, yang perlu tahu bagaimana 2022 ini Bapak mempunyai program-program

sesuai Tupoksi Bapak dalam mengelola badan ini. Ini hanya komentar saha, jadi mohon juga tidak dijawab juga tidak apa-apa Pak, karena saya hanya komentar bahwa ini masih kurang dari sempurna.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, ...(suara tidak jelas)...Pak tadi, kok normative maka perlu lebih tajam dan sebagainya.

Dipersilakan dari Fraksi PKS, Pak Kyai, ya dari PAN dipersilakan yang terhormat Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Dirjen dan Kepala Badan Standarisasi Kajian Jasa Industri.

Sebelumnya kami haturkan *taqobballahu minka waminkum*, mohon maaf lahir batin. Pak Dirjen dan Pak Kepala, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Gandung tadi, bahwa ke dua lembaga ini dari kedirjenan dan Badan Standarisasi Kajian ini ketika keluar Perpres tentang BRIN, ini posisi galau. Kegagalan ini nggak diungkapkan secara transparan di dalam presentasinya, artinya apa? Baik dalam pengembangan wilayah maupun dalam kajian standarisasi inikan butuh anggaran dan butuh tenaga-tenaga ahli dalam riset dan kajian. Kebetulan tidak ada Pak Sekjen di sini. Dalam postur APBN dari Kementerian Perindustrian itu kalau tidak salah saya ada 10% Pak kajian di situ, anggaran kajian. Bisa ada yang jawab Pak, mohon maaf Pak Pimpinan.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Izin, Pak.

Pak Pimpinan, Pak Nasril yang kami hormati,
Bapak/Ibu sekalian.

Bahwa terkait undangan hari ini kemarin memang pasca BRIN, jadi terkait itu yang kami siapkan. Nah, terkait anggaran pernah kita bahas Pak di awal-awal tahun Pak, jadi sudah dibahas plot anggarannya. Nanti kalau perlu nanti kami sampaikan lagi Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak katakan postur APBN 2021 atau 2020, ada nggak 10% dari APBN itu masuk ke dalam anggaran kajian di kementerian.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Sebentar Pak, di *slide*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak yang 2020 Pak atau 2019.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Nanti saya lihat dulu sebentar Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Mungkin tidak dibutuhkan akurasi yang presisi tapi ada semacam *common* biasanya, oh sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu kan biasanya begitu APBN itu. Apakah apa pernah atau secara kuantitatif penelitian, pengembangan dan kajian itu adalah mencapai 10% misalnya kan begitu dari APBN yang disiapkan. Saya pikir ada ya Pak.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Ada Pak, jadi sampai 2018 itu 2% Pak untuk kajian, kemudian 6% untuk 2019 dan 10% untuk 2020, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Artinya ketika penelitian, kajian dan juga riset itu sudah masuk ke BRIN saya menganggap ke dua lembaga ini lumpuh total, karena ya kalau anggarannya ke depan ya *ncrit-ncrit*, bisa dibilang begitu. Nah, ini tentunya apakah dapat dijawab ke depan fungsi kelembagaan ini tanpa ada anggaran dan pembiayaan masih berperan kah itu gitu, Pak.

Yang kedua untuk Pak Dirjen, Bapak tadi katakan ada 138 kawasan industri di republik kita ini dan satu kawasan itu, 138 ya Pak dan setiap kawasan itu UKM, ada UKM center apa namanya Pak.

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Zona untuk kawasan industri kecil dan menengah, didalamnya ada zona kawasan industri kecil dan menengah.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Berapa persen dari *tenant* itu.

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Itu 5% Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

5% dari total *tenant*.

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Dari total kawasannya Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya dia kan punya satu kawasan berarti kan sekian *tenant*, berarti 5% untuk UKM.

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

IKM.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

IKM ya Pak, saya ingin tahu konsep IKM yang dibangun dalam sebuah kawasan industri itu, karena saya melihat ya katakanlah industri otomotif kan gitu, apa yang dapat dikerjakan oleh IKM. Industri alat berat, apa yang dapat dikerjakan oleh IKM. Saya tidak melihat ya, tidak melihat dorongan untuk membangun industri kecil yang *men-supporting* industri besar. Tapi kecenderungannya lepas dari pada pengawasan, baik daripada pemilik kawasan atau pengelola kawasan dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kalau industri otomotif tadi itu yang dipergunakan untuk kecil-kecil itu adalah anak-anak dan cucu perusahaannya dan keluarganya. Jadi artinya apa? Tidak menumbuhkan industri kecil maupun industri-industri baru yang sifatnya tidak menumbuhkan, Pak. Artinya dari hulu sampai hilir sebuah industri tadi tidak mendorong pertumbuhan industri lokal tadi. Katakan industri ada investor dari luar ataupun industri apa investornya dari Jawa ke daerah, yang dia bawa orang Jawa semua, dari Jawa semua gitu, tidak menumbuhkan industri lokalnya, itu yang kami lihat.

Jadi *supporting* industri nggak tumbuh. Nah, saya ingin tahu konsepnya, Pak kedepan yang berjalan maupun yang kedepan. Tadi ada disampaikan ada kawasan industri generasi 1, 2 dan 3 dan 4 maksudnya apa itu. Nah, ini juga kami ingin tahu, generasi apa yang dimaksudkan dalam sebuah kawasan 1, 2 dan 3 dan 4 tadi.

Dan selanjutnya, nah Pak Dirjen dapat PNBPN nggak di sini, masuk dapat PNBPN nggak di badan maupun di kewilayahan ini, PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Tidak ada, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tidak ada ya? Di BSKJI? Ada dapat Pak ya? Berapa per tahun, itu Pak?

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Kurang lebih 180 miliar ini total ya dari Aceh sampai Papua, itu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasionalnya, semua kita membiayai sendiri Pak karena tadi dari rupiah murninya terbatas, ada PNBPNya untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi tadi untuk anggaran yang halaman 10 tadi Pak, kelihatan lebih dari 70% untuk operasionalnya Pak, hanya untuk gaji dan apa namanya operasional dan non-operasionalnya. Jadi sekitar 74% di tahun 2018 untuk gaji itu, kemudian 69% di 2019, 66% 2020, kemudian di 2021 71% dan 2022 65% dari rupiah murni APBN Pak, sisanya kita cari.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Oke, terima kasih.

Artinya Pak, kalau ada PNBPNya tentu PNBPNya ini bisa naik bisa juga turun. Kita inginkan PNBPNya naik Pak, tentu kami ingin tahu ya tadi ada tantangan dan harapan. Tentu kita berharap tantangan Bapak itu adalah inikan kita menjual Pak ya, menjual jasa ya. Nah, bagaimana *satisfaction*-nya kepuasan daripada *tenant* atau kepuasan di dalam pengelolaan industri untuk meningkatkan PNBPNya tadi. Artinya jasa Bapak itu bagaimana meningkatkan PNBPNya tadi, sehingga kita kan, kalau yang tahun lalu Komisi VII selama kita bermitra di baik di Komisi VI maupun Komisi VII itu kan jarang-jarang itu dorongan penambahan APBN melalui optimalisasi dari komisi itu sangat luar biasa. Kemarin Komisi VII memberikan *supporting*, lebih kurang 150-250 miliar waktu itu, inikan sangat luar biasa. Nah, kalau ke depan masih didapat ya syukur, kalau tidak kan tentu PNBPNya Bapak ini harus dinaikkan, nah bagaimana pola menaikkan PNBPNya.

Dan terakhir Pak Dirjen tentang kawasan ibukota, ibukota nusantara yang baru apa pandangan Bapak ke depan terhadap. Apakah akan muncul di situ industri, kalau muncul industri yang bagaimana? Ini kan biasanya kan kalau perpindahan ibu kota itu industri tetap tidak di bawa ke ibu kota. Di sana adalah sebuah provinsi birokrasi dan administrasi, ada kah konsep yang terhadap ibu kota baru untuk pengembangan kewilayahan di sana.

Saya pikir itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, yang terhormat Pak Nasril, tadi dengan berbagai catatannya jadi salah satunya adalah betapa pentingnya kawasan industri itu menjadi pengungkit bagi tumbuhnya industri-industri yang lain. Kalau ada investasi di situ maka itu akan menarik setidaknya turunan-turunan yang lain atau

pelengkap-pelengkap yang lain. Saya ingat sekali bagaimana boeing, bagaimana airbus itu pintunya diproduksi di mana, sayapnya produksi di mana. Demikian juga di otomotif, otomotif bagaimana satu mobil itu komponen-komponennya diproduksi oleh bisa saja dalam konteks kita, dalam konteks Indonesia adalah IKM (Industri Kecil Menengah) yang memproduksi.

Saya ingat sekali bagaimana di Purbalingga, ini dapilnya Pak Taufik Hananto itu ada kawasan industri yang sungguh luar biasa tumbuh dari bawah, namanya industri knalpot. Knalpotnya kualitasnya kualitas luar biasa sempat dipakai oleh Brabus, Brabus itu adalah salah satu *creator* dari otomotif yang mengimprovisasi Mercedes-Benz, pakai knalpotnya dari Purbalingga. Demikian juga Purbalingga adalah kalau kita jalan-jalan, kebetulan kalau kemana-mana saya ini dikawal istri, gitu. Jadi istri saya kalau beli *idep* itu bulu rambut, bulu mata itu selalu produksinya adalah dari Purbalingga, di dunia manapun, ini Mbak Ning tahu istri saya suka ngawal saya.

Saya kira itulah bagaimana sebuah industri yang itu semula adalah lokal tapi karena kualitas dan kita berharap tadi persis juga disampaikan oleh Pak Hendri, bagaimana peran dirjen ini dalam konteks kawasan industri karena faktanya adalah kawasan industri dikelola oleh BUMN, ada oleh swasta, seperti misalnya Jababeka itu oleh swasta dan tadi betul Kawasan Industri Medan atau KIM itu dikelola oleh BUMN dan seterusnya.

Saya kira itu luar biasa catatan-catatan, bagaimana juga meningkatkan PNBK, betul. Komisi VII saking mau mendorong industri khususnya adalah Kementerian Perindustrian ini kita mampu menaikkan dalam APBN kemarin 250 miliar. Meskipun kecil seolah-olah tetapi betapa di tengah-tengah *refocusing* yang lain, ini kita malah bisa menaikkan itu semata-mata karena memang Komisi VII juga ingin industri kita berkiprah sangat luar biasa dalam konteks kemajuan bangsa ini.

Hal lain, mungkin dipersilakan, oh iya Pak Nurhasan dipersilakan dari Fraksi PKS.

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat menjelang siang.

Pimpinan Komisi serta dari Kementerian Perindustrian, Pak Dirjen serta Kepala Badan.

Saya coba memahami dari 2 lembaga ini, ya tentunya era industri ini, baik industri generasi pertama, kedua, ketiga, keempat ini luar biasa. Tumbuhnya industri ini kan seringkali tumbuh lebih cepat dari apa yang kita desain, sehingga ya memang orang dagang, orang bisnis cepet banget mikirnya, belum kita atur regulasinya dia udah lebih cepat. Itu namanya juga orang bisnis, bukan orang bisnis ya terlambat mengantisipasinya tapi ya terlambat lebih bagus. Kajian-kajian yang disampaikan oleh Saudara Dirjen ini di satu sisi di kawasan luar Jawa menjadi prioritas, di Jawa juga dengan jalur

tol dari Merak sampai ujung Jawa, ini industri tumbuh di pinggiran tol, baik kawasan industri generasi ketiga, keempat itukan ideal sekali tapi masih jauh seperti di daerah kawasan industri dapil saya paling tidak tanggung jawab saya apa. Itu daerah Subang, Majalengka dan Sumedang, ini kawasan industri pinggiran tol dilewati tol semua Pak, belum lagi persoalan transisi dari era pertanian ke industri. Industri ini juga sudah merubah gaya hidup sebuah daerah, walaupun Bapak sudah punya desain bagaimana generasi ketiga dan keempat kawasan industri. Ini kan enak didengar tapi implementasinya mengintegrasikan sinergitas dengan pemerintah daerah juga tidak mudah. Kadang-kadang para perusahaan industri di kawasan itu juga susah diajak sinergi, mau *dewek*-nya aja Pak. Jadi Bapak di atas kertas bagus, tapi implementasi belum lagi persoalan kawasan industri yang tidak, ya kawasan hijau lah yang Bapak bilang industri hijau tapi nyatanya semau-mau juga Pak urusan seperti persoalan perizinan, persoalan limbah, persoalan apa ini siapa yang mengendalikan, nah itu persoalan lain.

Juga persoalan transisi transformasi yang istilah Bapak dari BPPI ke BSKJI yang lebih implementatif, ini juga jangan sampai kita lebih cepat Pak, negara nggak boleh lebih lambat dari perusahaan industri, berapa perusahaan. Negara ini punya *power* yang kuat, kita sering mereka lebih cepat dari kita. Nah, untuk itu, kawasan pinggiran tol ini, kawasan industri yang luar biasa Pak, ini saya juga belum baca ya terutama daerah yang kecil di depan mata saya. Satu sisi saya juga apresiasi Kementerian Perindustrian sudah menghidupkan seperti di kawasan Majalengka, sudah mengantisipasi faslitas industri, Bapak investasi puluhan miliar, ratusan miliar membuat kawasan industri kecil menengah, itu saya apresiasi tapi saya lihat *maintenance*-nya juga lagi-lagi lemah. Bapak sudah kasih dana gede seperti di Majalengka, Bapak kasih gede saya kaget juga punya proyek industri dari Kementerian Perindustrian, hebat, untuk mengantisipasi untuk kecil menengah, tapi ini pemerintah daerah juga tidak bisa mengelola secara optimal. Ini lagi-lagi kontrol Pak, jadi kontrol, arahan dari Kementerian Perindustrian tingkat pusat, kementerian pusat ini penting Pak. Jadi langkah-langkah Bapak juga saya apresiasi dalam banyak hal, tetapi dalam mengantisipasi ke depan ini juga tantangan kita.

Ya, tentu tugas kita bersama kita, DPR dan eksekutif, terima kasih Pak. Saya baca dan menikmati ini tapi implementasi ini juga sama-sama kita kontrol.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Nurhasan dari Fraksi PKS, jadi banyak hal tadi luar biasa bagaimana transisi dari pertanian ke industri banyak sekali faktor, ada *culture solve* tadi secara khusus digaribawahi. Juga begini perubahan menyusutnya lahan produktif, kita tahu, saya pernah menjadi staf khusus Kementerian Agraria Tata Ruang. Lahan produktif itu menyusut setiap tahun 1,4% karena

industri, belum aspek yang lain misalnya karena persoalan budaya, warisan misalnya itu juga menyusutkan lahan produktif, kecil tetapi kalau 10 tahun itu artinya 14%. Ini juga harus menjadi perhatian, memang ada namanya skala ekonomi, kalau tanam 1 hektar itu kalau ditanami dengan pertanian itu menghidupi sekian keluarga. Kalau di situ berdiri industri, kurang lebih akan kelipatannya kurang lebih 4,8 kali lipat waktu itu dihitung-hitung, memang tapi lagi-lagi inikan memerlukan transisi-transisi yang juga memerlukan perencanaan-perencanaan yang baiklah gitu, sehingga tidak terjadi *culture shock*, orang yang biasanya tradisi pertanian merangkap tradisi industri dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi demikian kalau memang sudah cukup dianggap cukup, Pak Fauzi nampaknya ada yang mau disampaikan.

Dipersilakan yang terhormat.

F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, teman-teman Komisi VII,
Yang saya hormati pula Pak Dirjen dan Bapak-bapak dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Saya sedikit saja Pak, yang ingin saya minta penjelasan lebih dalam. Hal ini mungkin sehubungan saya baru di Komisi VII, Pak.

Yang pertama, ada di halaman 3, Pak. Di sana dijelaskan poin kedua, ada pembangunan 36 kawasan industri dengan memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa yang didukung dengan penyediaan lahan sekitar 50 hektar. Kebetulan dapil saya inikan di luar Jawa, kira-kira saya perlu perinciannya Pak, mudah-mudahan masuk juga di dapil saya kan gitu, itu yang pertama.

Yang kedua, sehubungan tadi saya katakan saya jelaskan bahwasanya saya orang baru di Komisi VII. Di sini ada pembangunan sentral IKM baru Pak, nah ini apakah sentra IKM ini sudah ada di kabupaten atau belum sama sekali. Nah, kalau memang sudah ada, kira-kira berapa yang sudah ada dan berapa yang akan dilanjutkan karena ini juga akan hadir nanti di setiap kabupaten rencana sentral IKM, kalau melihat penjelasannya.

Kemudian masalah PNBPN, saya setuju sekali tadi dari pembicara sebelum saya, pendapatan nonpajak ini harapannya pasti kami dari DPR Pak, mengharapkan itu lebih dimaksimalkan, apalagi ditunjang dengan APBN dan harus dibicarakan oleh DPR penggunaannya.

Kemudian juga Pak, saya memperhatikan bahwasanya ada beberapa kawasan industri yang menurut saya juga kurang maksimal atau mangkrak,

Pak. Nah, ini juga perlu penjelasan kira-kira ada berapa yang kawasan industri yang kurang maksimal dimanfaatkan atau mungkin mangkrak, seperti setahu saya di dapil saya di Palopo Pak itu kawasan industri sama sekali tidak berfungsi, Pak, begitu.

Yang terakhir, untuk Badan Standarisasi. Badan ini merupakan sebuah badan yang menurut saya harusnya menghasilkan perindustrian, sentra industri yang mempunyai standarisasi bukan saja apa meningkatkan kerjasama, tapi juga harus dapat mencegah hal-hal negatif di lingkungan kawasan industri itu, Pak. Misalkan bicara tentang limbah Pak, tadi disinggung oleh Pak Kyai tadi mengenai limbah, Pak. Nah, ini saya pikir perlu ada penekanan Pak, apalagi kalau nanti misalkan ini ada hubungannya dengan IKM baru, sentra IKM Pak, ini bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya mengingat misalkan. Sekarang bayangkan saja Pak, tambang galian C itu sekarang sudah ditarik ke provinsi, kabupaten tidak mempunyai wewenang untuk itu, izinnya itu juga baru 5 tahun, tadinya cuma 1 tahun. Bagaimana hal-hal seperti ini kabupaten mengkoordinasikan rencana-rencana yang kemungkinan misalkan mereka dilibatkan dan walaupun ada permasalahan mereka bisa bertindak, sekarang ini hampir tidak bisa bertindak apa-apa termasuk misalkan kehutanan juga ditarik ke provinsi, sehingga tidak ada perwakilan. Sekarang penebangan di mana-mana karena memang kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan menegur, pada saat ditegur apa kapasitas kita, Pak untuk menegur kamu.

Jadi itu, Pimpinan sementara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Fauzi dari Fraksi Partai Golkar, tadi menggarisbawahi banyak hal. Sangat-sangat penting apa yang ditekankan, tadi salah satu kawasan industri baru banyak di luar Jawa ini misalnya syarat-syaratnya apa sih, jangan-jangan juga mau dengan tim beliau akan membentuk kawasan baru kawasan industri. IKM industri kecil menengah dengan berbagai catatannya mohon menjadi perhatian betul, soal limbah ini kadang-kadang menjadi masalah. Saya ingat sekali kebetulan dapil saya di Cilacap dan Banyumas itu ada batik, sama-sama kita tahu, batik itukan juga mengeluarkan limbah yang banyak sekali. Jadi mohon ini juga kalau ditata dalam satu kawasan industri IKM saya kira jauh lebih baik dalam utamanya mencapai pengelolaan lingkungan.

Ya, saya kira itu, kalau memang sudah dianggap cukup ya Pak Gandung cukup ya.

Kita persilakan Pak Dirjen dan Pak Kepala untuk menyampaikan apa-apa yang dialami oleh anggota yang terhormat. Jadi pukul 12.05 menit bagi kita umat muslim yang menjalankan salat zuhur, simultan saja dipersilakan.

Dipersilakan yang terhormat, Pak Dirjen.

DIRJEN KPAAI KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Terima kasih yang terhormat Ketua, Pimpinan Komisi VII dan Anggota yang terhormat atas arahan dan masukan tadi serta tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kami jelaskan.

Mohon izin, kami menjelaskan atas perkenan Pimpinan Komisi VII yang terhormat. Tadi yang pertama catatan dari Pimpinan, dari Pak Ketua ini memang kita harus terus Pak mendorong industrialisasi karena dengan industrialisasi nilai tambah komunikasi yang kita miliki ini bisa kita dapatkan, sehingga tadi keuntungannya akan lebih besar selain daripada mengisi kebutuhan dalam negeri, juga bisa memperluas ekspor.

Mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, hari ini di Konawe, Bapak Wakil Presiden juga meresmikan pembangunan. Dimulainya pembangunan Kawasan Industri Bumi Oheo yang dimiliki dan dikelola oleh PT Nusantara Industri Sejati. Jadi ini ada 1 tambahan kawasan industri baru Pak hari ini yang dimulai pembangunannya, itu informasi pertama dan ini informasi yang cukup baik untuk kita semua, agar proses hilirisasi dari komunitas atau bahan tambang yang kita miliki itu bisa kita dapatkan semakin besar nilai tambahnya.

Berkaitan dengan apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Gandung di halaman 5 terkait dengan okupansi industri, terutama di wilayah Maluku dan Papua, memang masih cukup rendah, Pak. Ini berkaitan juga memang dengan kondisi wilayah dan potensi yang ada, jadi untuk membangun kawasan industri pengalaman kami, ini ada kita harus mencari *anchor tenant*-nya atau *champion*-nya, Pak. Jadi agak sulit kita membangun suatu kawasan tanpa *anchor tenant* atau *champion* yang akan menjadi *lead*, sehingga nanti akan tumbuh industri pendukungnya di sana. Jadi biasanya harus ada *anchor tenant*-nya dulu. Ini yang kami bersama-sama Direktorat Jenderal Pembinaan Industri mencari, jadi tugas kami di Direktorat Jenderal KPAAI adalah bagaimana menyiapkan infrastrukturnya yaitu kawasannya, nah kemudian mengisinya bersama-sama dengan direktorat jenderal pembinanya apakah itu di sektor industri agro, industri logam mesin alat transportasi alat elektronika maupun industri kimia farmasi dan tekstil.

Jadi untuk semua proyek strategis nasional yang kami menjadi *lead* untuk penyiapannya, ini kami selalu meminta rekomendasi dari direktorat jenderal pembinanya Pak agar mereka segera menyiapkan *anchor tenant*-nya agar bisa berjalan. Jadi pengalaman kami ini ada beberapa kawasan industri yang tidak berjalan dengan sesuai perencanaan, mandek begitu atau lama sekali pengembangannya karena biasanya *anchor tenant*-nya tidak ada, sehingga kesulitan mengembangkan kawasan industri tersebut.

Untuk di kawasan Maluku dan Papua, khusus di Maluku Utara ini sudah ada beberapa kawasan industri yang sekarang sedang dalam proses pengembangan di Halmahera dan di Pulau Obi, ini yang berbasis nikel juga di sana. Sehingga industri hilirisasi nikelnya itu diwadahi dalam kawasan industri di sana. Untuk khusus di Papua, memang sesuai dengan Undang-undang 3 Tahun 2014, kami mendorong penyebarluasannya itu dimulai dari timur, Pak. Oleh karena itu, didalam rencana induk pembangunan industri nasional ditetapkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2015, itu yang nomor 1 harus dibangun di Papua dahulu. Itu kita kita punya project untuk pengembangan industri di Teluk Bintuni untuk memanfaatkan gas yang ada di Tangguh maupun di Genting, Pak. Ini saat ini prosesnya sedang dalam penyelesaian studi, termasuk penyelesaian KPBU-nya. Jadi kami dibantu oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini PT SMI, ini melakukan kajian untuk bisa menyiapkan anggaran sehingga nanti bisa membangun kawasan industrinya sehingga nanti industri yang akan masuk seperti tadi Pak Pimpinan menyampaikan PKP yang akan bersama-sama dengan investor internasional Pak, itu akan bisa mengembangkan pabrik amonia, kemudian pabrik pupuk juga di sana termasuk juga memanfaatkan konsep CCUS (*Carbon Capture Utilize and Storage*), sehingga bisa mendorong mempercepat upaya karbon netral yang kita targetkan di 2060. Ini yang sedang kami lakukan prosesnya dan saat ini masih berlangsung.

Kemudian berkaitan dengan perizinan. Ini memang saat ini perizinan untuk pengembangan kawasannya sendiri lebih mudah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun memang ada beberapa persyaratan khusus untuk kawasan industri yang nantinya kami akan melakukan verifikasi sebelum itu bisa dikeluarkan. Mohon izin karena kalau untuk kawasan ini berkaitan dengan tata ruang dan lahannya, kami harus pastikan tata ruangnya, lahannya berada di kawasan peruntukan industri sehingga sesuai dengan perencanaannya dan tidak mengganggu tadi seperti disampaikan pimpinan berkaitan dengan tujuan penggunaan bahan yang sudah ditetapkan di wilayah tersebut.

Berkaitan dengan daya saing untuk kawasan industri memang kita harus cukup cermat Pimpinan dan Anggota yang terhormat, berkaitan dengan pengembangannya. Permasalahan untuk pengembangan Kawasan Industri adalah harga lahannya karena kalau harga lahannya bisa didapat lebih mudah dan lebih murah tentunya bisa menyiapkan infrastruktur lebih cepat. Ini biasanya kalau pengembangan kawasan seperti yang diatur dalam regulasi, ini mereka biasa memulai dengan 50 hektar Pimpinan, karena untuk mendapatkan UKI ini cukup 50 hektar. Kemudian dikembangkan setelah *champion*-nya masuk sesuai dengan izin lokasi yang mereka miliki baru berkembang, tidak sekaligus. Ini yang memang biasanya terjadi.

Nah, berkaitan dengan kawasan industri generasi 1, 2, 3, 4 mungkin sederhananya kami mohon izin menjelaskan. Untuk kawasan industri generasi pertama itu dibangun sebelum tahun 90-an, ini sebagian besar adalah BUMN, tadi di Medan, di Surabaya ada SIER, kemudian di Makassar ada Kawasan Industri Makassar, kemudian di Jakarta ini ada sejak tahun '70-an ada di Pulogadung di JIP (Jakarta Industri Pulogadung) kemudian ada di KBN. Nah,

untuk kawasan ini waktu itu memang regulasinya belum seketat sekarang, belum sedetail sekarang sehingga ada beberapa permasalahan, tadi seperti pernyataan Pak Hendrik sampaikan di KIM Medan itu atau misalnya paling mudah di Surabaya Pak, ada kawasan industri SIER itu yang letaknya kalau dahulu di luar kota Surabaya, sekarang letaknya sangat strategis di antara kota Surabaya dan Bandara Juanda sehingga bisa menjadi sekarang jalur alternatif untuk dilewati padahal untuk Kawasan Industri seperti sekarang ini, ini tidak boleh digunakan sebagai jalur umum, ini diperuntukkan secara khusus tapi karena saat itu belum regulasinya belum seketat sekarang. Ini yang memang menjadi PR kita semua untuk menyelesaikan bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Nah, untuk kawasan industri generasi kedua itu setelah tahun 90-an, setelah ada regulasi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta membangun ini tumbuh sedemikian massif. Salah satunya disampaikan Pimpinan di Jababeka misalnya, ini dibangun oleh swasta. Ini mereka masuk ke generasi kedua.

Kemudian generasi ketiga itu pasca Undang-Undang 3 Tahun 2014, di mana diatur bahwa industri wajib berlokasi di kawasan industri. Sejak saat itu diatur secara sangat detail pengembangan maupun pengelolaan kawasan industrinya. Jadi apa yang harus mereka siapkan untuk bisa mendapatkan izin itu diatur secara lebih jelas, apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana menyiapkannya. Kemudian, mereka juga harus tetap mengikuti ketentuan misalnya ada *estate regulation* yang juga mereka harus laksanakan, harus melakukan pengawasan beberapa hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi perusahaan kawasan industri atau pengelola kawasan industri itu tugasnya pertama menyiapkan infrastruktur di kawasannya, lahan, jalan, jembatan kalau diperlukan, air yang diperlukan oleh industri, kemudian termasuk pengelolaan limbahnya, termasuk juga menyediakan jaringan infrastruktur listrik dan gas, apabila mereka bisa menyiapkan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Nah, untuk kawasan industri generasi keempat, itu pasca pencanangan *making* Indonesia 4.0. Ini paska 2018 kita dorong kawasan-kawasan industri ini juga bisa menerapkan konsep dari *making* Indonesia 4.0 sehingga mereka bisa lebih efisien dan lebih efektif dalam pelaksanaan dan ini dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan industrinya. Ini sederhana untuk pengistilahan generasi kawasan-kawasan industri tersebut.

Berkaitan dengan pengelolanya, ini memang ada beberapa, mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat. Tadi disampaikan termasuk oleh Pak Fauzi bahwa kawasan industri yang mungkin mangkrak, ini biasanya tadi pertama berkaitan dengan kemampuan pengelolanya. Jadi pengelola kawasan industri atau pemiliknya ini selain dari swasta dan BUMN juga ada BUMD, Pak. Ini yang mereka kesulitan mendapatkan *anchor* atau *champions* biasanya juga akan lambat pengembangan selanjutnya, itu berkaitan dengan pelaksanaannya.

Di Papua Barat tadi seperti disampaikan Pak Rico Sia, di Manokwari kami nanti akan kaji sesuai arahan Bapak untuk bagaimana bisa mengembangkan kawasan industri. Kami akan cari peruntukan industrinya di sana, mungkin nanti bisa memanfaatkan karena di sekitar Manokwari juga ada industri perkebunan yang mungkin bisa dilakukan hilirisasinya di sana.

Tadi Pak Hendrik Sitompul menyampaikan di Sumatera Utara ada 3 kawasan industri Pak, betul di Kawasan Industri Medan/KIM, kemudian Kawasan industri Medan Star, Pak, itu kemudian ada di Kawasan Industri Semangke yang saat ini ditetapkan juga sebagai kawasan ekonomi khusus. Jadi kawasan ekonomi khusus ini berkaitan dengan status KEK-nya sendiri, ini ada penekanan terhadap perizinan dan fasilitas. Untuk berkaitan dengan tata kelolanya ini diatur oleh dewan nasional kawasan ekonomi khusus Pak, di kantor Menko Bidang Perekonomian. Fungsi kami adalah mengenai pembangunan kawasan industrinya, jadi Kawasan ekonomi khusus Semangke ini merupakan Kawasan Industri Semangke yang ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi khusus. Mereka ada fasilitas tambahan yang diberikan oleh pengelolanya, misalnya terkait dengan perizinan dan fasilitas lain yang diberikan. Namun kami juga bertanggung jawab untuk pengembangan industrinya.

Mohon izin tadi, berkaitan dengan bagaimana bisa men-sinergikan antara industri yang ada di dalam dengan *tier* dibawahnya, industri-industri pendukungnya nanti kami juga akan sampaikan kepada direktur jenderal pembinaanya industrinya Pak, karena kami bertugas untuk kawasan industrinya, sedangkan industrinya sendiri ini di bawah binaan Direktorat Jenderal Pembinaan Industri sesuai dengan bidangnya. Apakah itu di otomotif misalnya tadi akan kami sampaikan karena memang ada program-program juga, termasuk juga di Direktorat Jenderal IKMA (Industri Kecil Menengah dan Aneka) punya beberapa program dan saat ini ada sekitar 7 ribuan sentra industri kecil dan menengah tersebar di seluruh Indonesia yang kami fasilitasi, mulai dari pengembangan infrastruktur di dalamnya sampai kepada kelembagaannya. Jadi ada empat aspek yang bisa diintervensi oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sentra-sentra IKM yang ada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara tugas kami untuk industri kecil menengah yang ada di dalam kawasan industri memastikan bahwa seluruh kawasan industri tersebut menyediakan zona untuk kepentingan industri kecil dan menengah, karena bagaimanapun untuk mendukung operasionalisasi dari *tenant-tenant* dan kawasan industri ini perlu juga melibatkan industri kecil dan menengah dari hal yang kecil, seperti misalnya untuk usaha-usaha untuk penyediaan makanan dan lain-lain Pak itu tetap harus dilakukan dan ini yang difasilitasi melalui zona industri kecil dan menengah tersebut. Memang sampai saat ini, kami akan terus Pak untuk mendorong, terutama dengan pemerintah daerah. Jadi, biasanya apabila ada industri kecil menengah yang akan masuk kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi agar mereka bisa difasilitasi masuk dalam kawasan industrinya, sehingga mereka bisa memanfaatkan zonanya.

Berkaitan dengan pemanfaatan itu sendiri, karena di dalam kawasan industri biasanya mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau standar dari pengelolanya berkaitan dengan operasional instansi termasuk juga bagaimana penanganan limbah. Ini biasanya membuat industri kecil menengah itu enggan masuk Pak, jadi mereka bukannya tidak mau masuk tetapi mereka mungkin belum *aware* atau banyak tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mereka memilih berada di luar.

Memang ada beberapa industri tertentu yang dalam pengamatan kami ini menjadi kawasan industri Pak, sehingga sampai hari ini memang masih ada beberapa industri yang mencoba mengajukan izin di daerah-daerah yang belum ada kawasan industrinya. Ini biasanya industri yang sifatnya padat karya yang mungkin mereka menganggap kalau masuk kawasan industri akan ada beban biaya yang besar berkaitan dengan operasionalisasinya. Ini yang kami terus hindari. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah terus menyiapkan daerahnya melalui penetapan kawasan peruntukan industri yang lokasinya cukup baik dan strategis. Jadi penataan di Pulau Jawa misalnya melalui Keppres Nomor 79, Nomor 80 dan Nomor 87 di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat misalnya di Kawasan Rebana tadi disampaikan oleh Pak Nurhasan di Sumedang, Pak. Ini kami juga dorong misalnya bagaimana memanfaatkan konektivitas antara Tol Cisamdawu dengan Cipali untuk pengembangan kawasan industri di Sumedang bagian utara, karena Sumedang sampai saat ini hanya di bagian selatan saja kemudian sampai ke Subang.

Nah, ini yang kami terus lakukan sinergitas bersama-sama dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait di pusat. Memang ada keterbatasan dari kami, Pak. Kebetulan anggaran di Direktorat Jenderal KPAII ini nomor 2 paling kecil di lingkungan Kementerian Perindustrian, tidak sampai 100 miliar hanya 97 miliar Pak dan itu cukup apa namanya tidak memungkinkan kami untuk melakukan apa namanya mendorong pengembangan industri lebih massif misalnya seperti kebutuhan untuk pengembangan kawasan industri Teluk Bintuni, Pak. Ini akhirnya kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk penyiapan lahannya, kami menyiapkan KPBU-nya dan dengan cara ini kami tetap berusaha untuk bisa mewujudkan tugas fungsi yang kami harus lakukan.

Berkaitan dengan IKM Pak, ini sudah ada Perpres Nomor 64 Tahun 2022 di mana saat ini berdasarkan Perpres tersebut ada alokasi zona kawasan industri, jumlahnya ada 2 kawasan industri dengan luas 697. Mengenai pengembangannya kami nanti akan coba berkoordinasi Pak dengan apa namanya dengan ketua pengelola IKM, Pak untuk bagaimana mendorong industri yang bisa mendukung IKM di sana.

Yang terakhir tadi, kami ingin sampaikan sedikit berkaitan dengan apakah, berkaitan dengan konsep pengembangan kawasan industri di Jawa dan luar Jawa. Jadi yang kami sampaikan tadi kenapa diprioritaskan di luar Jawa, karena infrastruktur di Pulau Jawa ini sudah cukup baik, cukup mudah sehingga memang yang perlu didorong di luar Jawa dan kami akan bedakan dengan fasilitasnya. Fasilitas untuk di luar Jawa harus bisa lebih bagus, lebih

baik sehingga iklim usahanya bisa lebih mendorong daya saing mereka untuk bisa bersaing dengan industri yang di pulau Jawa.

Demikian dari kami penjelasannya Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Dirjen telah menyampaikan jawaban.

Dipersilakan yang terhormat Pak Kepala.

KEPALA BADAN BSKJI KEMENPERIN RI (DODDY RAHADI):

Terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi VII.

Beberapa catatan kami tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan di awal mengenai UPT yang sebarannya sudah ke daerah-daerah. Kemudian juga terkait kontrolnya di aspek-aspek mengenai kehutanan, *land use*, energi, *green* energi. Kami saat ini tadi sudah ada 24 Pak, di daerah Satker UPT-nya dan kami sedang mengkaji usulan untuk tambahan-tambahan Pak, mudah-mudahan dapat dukungan Bapak dari DPR untuk beberapa daerah. Kami akan coba supaya terasa hadir nanti kami sedang kajian untuk di daerah Papua, di Daerah Kaltara, di Daerah Nusa Tenggara dan Batam, Sulawesi Tengah juga. Ini beberapa yang sedang kami kaji untuk di usulkan.

Kemudian terkait industri hijau, Pak. Hadir kita, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya untuk *award* dari industri hijau ini sudah berjalan, sedang berjalan sekarang nanti *award*-nya di sekitar bulan November ada sekitar 152 perusahaan yang mendaftar. Dan ini diantara kegiatan-kegiatan itu kemudian juga kita sudah melakukan sertifikasi industri hijau. Nah, ini penghematannya di sisi pengehematan air dan energi itu juga sudah ada, angkanya juga setara seberapa ada nilainya Pak, mungkin berikutnya akan kami sampaikan kepada Bapak.

Kemudian, terkait pertanyaan Pak Gandung tadi dari Fraksi Golkar mengenai program kegiatan nanti akan kami usulkan Pak ya, kami sampaikan walaupun pernah kami sampaikan, tapi kita akan sampaikan juga.

Nah, kemudian terkait yang BSKJI ini Pak Hendrik Sitompul, Fraksi Demokrat ini mengenai kolaborasi BSKJI dengan KPAILI tadi. Kita artinya terus berkoordinasi untuk *speed up* ini Pak bahwa kita juga sama-sama untuk terkait standarisasi iklim usaha industrinya. Kemudian, terkait digitalisasi di kawasan industri, kemudian juga kawasan industri hijaunya. Satker-satker kami di daerah juga melayani untuk terkait industri hijau ini, lingkungan gitu Pak ya. Jadi di beberapa daerah kami punya nama Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri di Semarang, balai-balai lainnya juga melakukan untuk jasa-jasa untuk industri hijau ini, Pak. Jadi terus kami lakukan, jadi dengan

kawasan industri kemarin juga Kaltara ya, kawasan industri hijau itu akan disiapkan di sana yang terbesar.

Kemudian terkait pertanyaan Pak Nurhasan dari PKS mengenai kecepatan untuk dengan industrinya, mana yang jangan kalah cepat dengan industrinya melakukan perubahan-perubahan. Kami tadi sampaikan untuk apa namanya kawasan-kawasan Industri, misalnya terkait industri hijau ya, kita BPPI tadi untuk yang limbahnya, limbah yang terkait limbah cair dan limbah berupa gas. Kami mengembangkan yang disebut AAMS (*Advance Adaptive Manufacturing System*). Kami pasang alat kontrol 24 jam untuk industri-industri, di antaranya industri tekstil. Misalnya juga ada kita di Solo pasal untuk *monitoring* industri tekstil, itu untuk bahan cairnya ke saluran-saluran itu kita kontrol 24 jam *online system*. Kantor kami di Semarang. Jadi dengan layanan itu kita bisa kontrol, apa namanya polusi yang ditimbulkan atau apa namanya terkait limbah-limbahnya. Nah, ini yang data harian ini yang kami berikan untuk industrinya, juga artinya untuk pelayanan industri lainnya. Pembangkit listrik kami bisa pasang di ...(*suara tidak jelas*)... atau untuk udara, pencemaran udara itu juga kami lakukan di pabrik-pabrik. Nah, ini jenis-jenis pelayanan yang kami lakukan untuk menjawab kebutuhan industrinya terkait *green* industri.

Kemudian juga terkait pertanyaan Pak Nasril tadi mengenai PNBP dan juga Pak Fauzi, tadi PNBP agar dimaksimalkan. Memang jenis-jenis layanan kami di antaranya adalah kalibrasi, sertifikasi untuk produk-produk manufaktur. Kemudian juga konsultasi tadi seperti untuk lingkungan ...(*suara tidak jelas*)... untuk nambah ini memang kita perlu *quality* infrastruktur, perlu alat, perlu sistem, perlu orang-orang yang *certified* untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ini yang kita perlu tambahan tadi, Pak, anggaran, APBN-nya karena kalau kita dari PNBP nggak kekejar. Ini salah satu instrumen juga untuk barangkali untuk nahan impornya sebenarnya dari situ, kalau kita punya sertifikat-sertifikat ini luar harus bisa mengikuti.

Kemudian juga ya tentu untuk menambah PNBP tadi Pak, sarana prasarananya untuk tadi di tambahan dari APBN-nya Pak. Kemudian tadi juga terkait pertanyaan Pak Fauzi juga yang tadi BSKJI jadi *center* industri yang standar ya mengenai kawasan-kawasan industri yang harus bersih, industri hijau tadi Pak. Tadi saya sudah sampaikan mengenai BPPTI tadi Pak, kita bisa lakukan itu dan di daerah-daerah juga baik itu di Kalimantan, di Sulawesi kami melayani juga Pak, kami memberikan untuk pengendalian lingkungan ...(*suara tidak jelas*)... untuk galian C yang di daerah yang ...(*suara tidak jelas*)... mereka wajib lapor UKL UPL-nya. Tadi mengenai limbah cair dan limbah berbentuk gas kita sudah kembangkan teknologi AAMS tadi Pak, kemudian ini bisa bantu daerah-daerah untuk mengontrol lingkungan tadi Pak, pengendalian limbahnya.

Barangkali itu terkait yang pertanyaan-pertanyaan pada BSKJI Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, kalau toh belum lengkap nanti akan dilengkapi, tapi karena masih ada mungkin mau pertanyaan lebih lanjut tapi kalau tidak karena memang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 35 sebagaimana tadi kita mau akhiri pukul 12 lewat 40, saya kira cukup Bapak/Ibu ya? Pak Nasril.

Dipersilakan yang terhormat Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

....(suara pembicara tidak terdengar)....

KETUA RAPAT:

Koreksi 3 miliar dolar Pak Willy, devisa turun dari 141 bahkan dalam 1 bulan itu turun 5 miliar dolar khusus dalam 3 minggu ketika larangan, turunnya 3 miliar dolar.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

....(suara pembicara tidak terdengar)....

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Willy.

Sebelum kita lanjutkan tadi ada Pak Nasril, kita perpanjang waktu kurang lebih 15 menit. Setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

(RAPAT : SETUJU)

Saya sedikit mengulas apa yang disampaikan Pak Willy, bagaimana karena tadi juga bagaimana Komisi VII sebaiknya membuat rekomendasi. Kita bersyukur Komisi VII dengan pemerintah waktu itu ketat betul perihal batubara. Bayangkan, kalau batubara kita main-main itu jauh lebih parah akibatnya dari sekedar minyak goreng karena Komisi VII ketat dengan DMO dan DPO, *domestic market obligation* dan *domestic price obligation*. Bahkan ketika ada kecenderungan melanggar maka dilarang ekspor, kita semuanya kompak waktu itu. Meskipun pertarungan luar biasa besar dan akhirnya selamatlah listrik hari ini masyarakat masih memperoleh listrik murah, kenapa? Karena DPO 70 dolar per ton. Bayangkan ketika bulan Desember akhir itu posisi batubara, harga acuan batubara sampai 380 khusus gar yang diperlukan oleh PLN itu gar 4.200-4.600 itu juga mencapai 280, sampai hari ini pun masih segitu. Nah bayangkan 4 kali lipat lebih dari harga semula, dari 70 dolar per ton itulah.

Saya kira rekomendasi dari Komisi VII meskipun wilayahnya komisi lain dalam hal ini Komisi VI. Meskinya juga ketat dari awal, ditetapkan DMO dan DPO diawasi dengan ketat. Kita tahu produksi sawit kita sekitar 57 juta ton,

padahal keperluan minyak goreng itu hanya 8 juta ton saja dan produk turunan yang lain kurang lebih sampai dengan ...(*suara tidak jelas*)... 3 itu hanya 18 juta ton saja. Artinya kalau di DMO 25% pun pas itu kurang lebih, seperempatnya dari produksi atau 30%-lah DMO dengan harga dan ditetapkan, kenapa? Karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi negara memang berhak mengatur, sayang sekali awal-awal sudah dilakukan DMO dan DPO tetapi tidak diawasi dengan ketat, tidak disiplin. Presiden menetapkan larang ekspor, rusak semua sekarang, petani yang kena, padahal itu hanya menyangkut kurang lebih 15 pengusaha besar saja. Seperti di Kalimantan Tengah tempatnya Pak Willy tadi, betul di situ ada Sinarmas besar sekali, Djarum besar sekali, di situ sentra-sentra kelapa sawit termasuk pengusaha lokal haji siapa kok lupa saya. Ya, intinya begitulah, dari menyangkut hajat hidup orang banyak memang negara harus mengambil peran yang aktif, yang rasional. Terlebih di kepala sawit kan ada sebenarnya BLU, semacam BLU yang bisa memikul harga.

Jadi itulah sebabnya sekali lagi karena itu wilayahnya sebenarnya komisi lain, tapi Komisi VII dalam konteks perindustriannya maka tadfi kami tekankan. Jadi industri Bapak/Ibu sekalian, disamping untuk ekspor untuk menyerap tenaga kerja tetapi juga memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya salah satu keberhasilan perindustrian, juga kalau kebutuhan-kebutuhan dalam negeri mencukupi termasuk juga substitusi impor kan begitu. Jadi hal-hal yang di-impor maka kita bisa produksi dalam negeri, maka itu namanya substitusi import untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita semuanya prihatin, kita adalah penghasil CPO terbesar di dunia tetapi kita berantakan di sisi minyak goreng, kenapa berantakan? Kan implikasinya ke inflasi itu, Pak. Jadi inflasi naik tiba-tiba karena faktor konsumsi yang disumbang oleh minyak gorang, untung saja listrik tidak menyumbang dalam komposisi inflasi. Padahal itu juga memang BBM karena naik, karena sudah tidak mampu, harga *crude* yang melompat tinggi dari ICP yang ditetapkan, dari 63 ICP rata-rata 98, ada selisih 30 dolar per barel. Demikian juga di CP Aramco untuk mengukur harga gas yakni di gas 530 ditetapkan di APBN 2022, tetapi harga gas kali ini impornya 880 elpiji liquid petroleum gas karena kita ekspor LNG (*Liquid Netral Gas*).

Jadi itu semuanya sekali lagi, Perindustrian harus berpikir holistik juga, berfikir mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari jarak pandang, mohon maaf dari pembuat kebijakan, dari menteri dan dirjen harus mencakup hal-hal itu. Sehingga pertama, industri harus mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu pokok utama. Kedua, lantas pasti berorientasi ekspor karena di pertumbuhan hanya bisa dicapai dengan ekspor, investasi dan konsumsi kan begitu, saya kira begitu.

Baiklah.

Ini sebenarnya juga ulasan karena terpancing oleh Pak Willy tadi, ini ada Pak Bambang Pati ini ahli timah, aman ya. Cukup ya? Saya kira cukup.

Baiklah.

Marilah kita sama-sama cermati untuk kita ada semacam draft kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Ketahanan Kewilayahan Industri dan Industri Internasional dan juga Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, untuk singkatannya agak repot ya, Kamis 19 Mei 2022:

1. Komisi VII DPR RI mendukung dan mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk melakukan *upgrading* kawasan industri, dari kawasan generasi kedua, serta ketiga atau *eco industrial park* menjadi kawasan industrial 4 atau *eco smart industrial park*.

Saya kira kita ada *smart city*, ada bahkan *country smart* itu mengandaikan bagaimana infrastruktur komunikasi, energi dan lingkungan yang bersih, saya kira arahnya itu, guna akselerasi dan efisiensi operasi sektor industri yang berwawasan lingkungan.

Saya kira betul tadi juga sudah dikemukakan bahwa kita sepakat *zero emission* di tahun 2060, *no poin to return*, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

2. Komisi VII DPR RI, eh setuju ndak ini, kok ...*(suara tidak jelas)*... setuju Bapak/Ibu sekalian ya

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan industri, guna kelancaran penerimaan investasi, mengingat agenda penerimaan investasi menjadi salah satu agenda prioritas pertama pemerintah.

Saya kira sepakat ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Kita pertambahan penduduk di atas 0,8 Bapak/Ibu sekalian, agak mengkhawatirkan. Bahkan sudah menyentuh 1%, kurang lebih 1 tahun lahir 7 juta bayi maka memerlukan investasi yang banyak juga, sehingga serapan lapangan kerja salah satunya adalah investasi. Ini poin nomor 2 ini. Ketiga, Komisi VII, eh sudah diketok ya.

3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk melakukan langkah-langkah yang mendukung penguatan industri manufaktur, sehingga terjadi peningkatan PDB penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan dari industri manufaktur.

Sepakat Bapak/Ibu sekalian? Memang kita harus mempertajam industri manufaktur.

(RAPAT : SETUJU)

Jadi kita tidak boleh bertumpu pada industri yang mengandalkan bahan baku alam. Hari ini kita seperti saya ulas di depan, bahwa betul surplus dari sisi ekspor tapi karena komoditi batubara naik, nikel naik, semua-semua naik tetapi lagi-lagi itu adalah setengah jadi, bahan setengah jadi. Kita ingin kalau ekspor ya ekspor televisi, ekspor mobil, ekspor dan sebagainya-sebagainya.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk melakukan pemerataan pengembangan wilayah industri dan pengembangan sentra industri kecil menengah di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian timur.

Saya kira betul, supaya juga terjadi pemerataan pembangunan indeks gini ratio, pemerataan antara Jawa, luar Jawa harus dikurangi dengan baik. Setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ketua, saya pikir untuk yang poin 4 itu jangan timur doang, wilayah barat juga, karena di Sumatera itu baru nggak begitu besar, hanya sekitar 27-an.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu di seluruh wilayah Indonesia saja, berhenti di situ ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tidak di wilayah barat dan timur.

KETUA RAPAT:

Tengah nanti ingin juga.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kalau tengah udah cukup, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini Pak Nasril kadang-kadang gara-gara, sudah punya cicit belum Pak Nasril, belum ya. Ini bukan apa-apa dari tadi kita kok jadi formal semuanya, apakah saya sendiri awali tadi agak lemes jadinya, kan biasanya kita semua cair.

Intinya betul bahwa kita adalah adalah seluruh wilayah Indonesia, saya kira, tidak hanya, ya sampai Indonesia saja, tidak hanya wilayah timur. Intinya

adalah perlu pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah dan IKM ke seluruh wilayah Indonesia. Saya kira itu Bapak/Ibu sekalian ya, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPR RI mendorong mendorong Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat melayani secara optimal, baik industri besar maupun industri menengah dan kecil.

Jadi sekali lagi aspek pelayanan Pak, misalnya perizinan, misalnya pembinaan, misalnya dan sebagainya-dan sebagainya. Setuju Bapak ya?

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VII DPR RI, nah kali ini, meminta Dirjen KPAII dan Kepala BSKJI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat 25 Mei 2022.

Setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Sungguh luar biasa hari ini hari awal-awal Tahun Sidang ke-5 Tahun 2021-2022 ini kita telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional atau KPAII dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, kita lakukan dengan sangat-sangat produktif, sangat-sangat baik, semuanya saling asah, asih, asuh kan begitu. Kita semuanya saling memberikan masukan bagaimana industri kita betul-betul menjadi salah satu soko guru perekonomian kita. Kita kenal ada koperasi, ada BUMN, ada industri, ada pertanian dan sebagainya-sebagainya.

Saya kira itu Bapak/Ibu sekalian, kita bersyukur, kita telah melalui rapat dengan sangat-sangat baik.

Untuk itu sebelum saya akhiri rapat ini, saya persilakan dirjen atau Bapak Kepala menyampaikan sambutan semacam *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

DIRJEN KPAII KEMENPERIN RI (EKO S.A CAHYANTO):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat atas seluruh arahan dan dukungan kepada kami Direktorat Jenderal Ketahanan

Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, sehingga kami bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kami harus laksanakan berdasarkan arahan dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan demikian dengan ucapan syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan Industri Dan Akses Industri Internasional atau KPAII dan juga dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, saya nyatakan ditutup.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002